

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Gedung F. Kemendikbud Ristek Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman. Senayan. Jakarta

Laman: *www.lsf.go.id/* e-mail: *sekretariat@lsf.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, Juli 2025
Sekretaris LSF.

Titik Umi Kurniawati, S.Sos
NIP. 197009151997032001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan Undang-Undang APBN Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Sensor Film adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasi. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan. akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Sensor Film. Di samping itu. laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta. Juli 2025
Sekretaris LSF

Titik Umi Kurniawati. S.Sos
NIP. 197009151997032001

DAFTAR ISI

Table of Contents

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	<i>i</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>ii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>v</i>
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	<i>1</i>
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	<i>4</i>
II. NERACA.....	<i>5</i>
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	<i>6</i>
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	<i>7</i>
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	<i>8</i>
A. Penjelasan Umum.....	8
A.1 Dasar Hukum	8
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Sensor Film.....	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4 Basis Akuntansi	12
A.5 Dasar Pengukuran.....	14
A.6 Kebijakan Akuntansi.....	14
1) Pendapatan- LRA	Error! Bookmark not defined.
2) Pendapatan- LO	Error! Bookmark not defined.
3) Belanja	Error! Bookmark not defined.
4) Beban	Error! Bookmark not defined.
5) Aset.....	Error! Bookmark not defined.
6) Kewajiban.....	Error! Bookmark not defined.
7) Ekuitas	Error! Bookmark not defined.
8) Penyusutan Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1 Pendapatan.....	22

B.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	22
B.2	Belanja.....	23
B.2.1	Belanja Pegawai	24
B.2.2	Belanja Barang.....	24
B.2.3	Belanja Modal.....	25
C.	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	27
C.1	Aset Lancar.....	28
C.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	28
C.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas.....	28
C.1.3	Persediaan.....	28
C.2	Aset Tetap.....	29
C.2.1	Peralatan dan Mesin	30
C.2.2	Aset Tetap Lainnya.....	31
C.3	Aset Lainnya.....	31
C.3.1	Aset Tak Berwujud	32
C.3.2	Aset Lain-Lain	32
C.3.3	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	33
C.4	Kewajiban.....	34
C.4.1	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	34
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1	Kegiatan Operasional	35
D.1.1	Pendapatan	36
D.1.2	Beban	36
D.2	Kegiatan Non Operasional	40
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1	Ekuitas Awal	42
E.2	Surplus / Defisit LO	42
E.3	Transaksi Antar Entitas	43
E.4	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	43
E.5	Ekuitas Akhir.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Anggaran Per Jenis Belanja.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. Rincian Aset Lancar	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Rincian Persediaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14. Rincian Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16. Mutasi Peralatan dan Mesin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18. Rincian Aset Lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 19. Mutasi Aset Tak Berwujud	Error! Bookmark not defined.
Tabel 20. Rincian Aset Tak Berwujud	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21. Mutasi Aset Lain-Lain	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25. Rincian Beban Pegawai	Error! Bookmark not defined.
Tabel 26. Rincian Beban Persediaan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27. Rincian Beban Barang dan Jasa.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 28. Rincian Beban Pemeliharaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 29. Rincian Beban Perjalanan Dinas..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 30. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 32. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 33. Rincian Surplus (Defisit) LO **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 34. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas **Error! Bookmark not defined.**



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film TA 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0

Pada Tahun Anggaran 2025 satker Lembaga Sensor Film dengan Kode Satker 902745 tidak memiliki DIPA

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2025 dan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2025. Jumlah Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.5.374.143.159 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.419.020.416. Aset Tetap sebesar Rp.3.132.680.020 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.822.442.723 Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0.

Sedangkan Aset pada 30 Juni 2024 sebelumnya dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.946.840.555 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.419.020.416. Aset Tetap sebesar Rp.3.705.206.916 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.822.613.223 Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0.

Jumlah Ekuitas per 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp. 5.374.143.159. Sedangkan jumlah Ekuitas pada 30 Juni 2024 sebesar Rp. 5.946.840.555

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit - LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.572.697.396 sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.(572.697.396). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.0 Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp.(572.697.396).

Sedangkan per 30 Juni 2025 adalah PNPB sebesar Rp. 1.226.513.892.- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 15.943.493.759. Sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.(14.716.979.867) Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.(36). Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp.(14.716.979.831).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp.5.946.840.555 dikurangi Defisit LO sebesar Rp.(572.697.396) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.0 terjadi kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.(572.697.396). Sehingga Ekuitas entitas Per 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.5.374.143.159.

Sedangkan per 30 Juni 2024 Ekuitas awal adalah sebesar Rp.5.785.481.635 dikurangi Defisit LO sebesar Rp.(14.716.979.831) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.14.018.673.150 terjadi kenaikan/penurunan ekuitas

sebesar Rp.698.306.681. Sehingga Ekuitas entitas Per 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.5.087.174.954.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Pada Tahun Anggaran 2025 Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki DIPA.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025		%	30 JUNI 2024		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	-	0,00	-	1.226.513.928	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-	1.226.513.928	0,00
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	0,00	12.918.219.000	5.201.893.081	40,27
Belanja Barang	B.2.2	-	-	0,00	33.869.011.000	9.072.475.797	26,79
Belanja Modal	B.2.3	-	-	0,00	2.230.000.000	970.818.200	43,53
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-	-	0,00
JUMLAH BELANJA		-	-	0,00	49.017.230.000	15.245.187.078	31,10

II. NERACA

LEMBAGA SENSOR FILM NERACA PER 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	0,00%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-	-	#DIV/0!
Persediaan	C.1.3	419.020.416	419.020.416	-	0,00%
Persediaan yang Belum Diregister	C.1.4	-	-	-	0,00%
Jumlah Aset Lancar		419.020.416	419.020.416	-	0,00%
ASET TETAP	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	60.459.071.804	60.459.071.804	-	0,00%
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	758.769.274	758.769.274	-	0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(58.085.161.058)	(57.512.634.162)	(572.526.896)	1,00%
Jumlah Aset Tetap		3.132.680.020	3.705.206.916	(572.526.896)	-15,45%
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	2.052.276.723	2.052.276.723	-	0,00%
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.292.337.725	1.292.337.725	-	0,00%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.522.171.725)	(1.522.001.225)	(170.500)	0,01%
Jumlah Aset Lainnya		1.822.442.723	1.822.613.223	(170.500)	-0,01%
JUMLAH ASET		5.374.143.159	5.946.840.555	(572.697.396)	-9,63%
KEWAJIBAN	C.4.1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.1				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	-	-	0,00%
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-	-	0,00%
Utang Muka dari KPPN		-	-	-	0,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	0,00%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	-	0,00%
EKUITAS					
Ekuitas		5.374.143.159	5.946.840.555	(572.697.396)	-9,63%
JUMLAH EKUITAS		5.374.143.159	5.946.840.555	(572.697.396)	-9,63%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.374.143.159	5.946.840.555	(572.697.396)	-9,63%

III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1				
PENDAPATAN	D.1.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	-100,00%
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	-100,00%
BEBAN	D.1.2				
Beban Pegawai	D.1.2.1	-	6.044.187.559	(6.044.187.559)	-100,00%
Beban Persediaan	D.1.2.2	-	23.097.955	(23.097.955)	-100,00%
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	-	4.773.187.944	(4.773.187.944)	-100,00%
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	-	825.880.253	(825.880.253)	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	-	3.632.882.600	(3.632.882.600)	-100,00%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	-	644.257.448	(644.257.448)	-100,00%
JUMLAH BEBAN		-	15.943.493.759	(15.943.493.759)	-100,00%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-	(14.716.979.867)	14.716.979.867	-100,00%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	-100,00%
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	36	(36)	0,00%
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	36	(36)	-100,00%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	(14.716.979.831)	14.716.979.831	-100,00%
POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT LO		-	(14.716.979.831)	14.716.979.831	-100,00%

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		NAIK/(TURUN) RP	%
		30 JUNI 2025	30 JUNI 2024		
EKUITAS AWAL	E.1	5.946.840.555	5.785.481.635	161.358.920	2,79%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(572.697.396)	(14.716.979.831)	14.144.282.435	-96,11%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	-	14.018.673.150	(14.018.673.150)	-100,00%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(572.697.396)	(698.306.681)	125.609.285	-17,99%
EKUITAS AKHIR	E.5	5.374.143.159	5.087.174.954	286.968.205	5,64%

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan. Pemanfaatan. Penghapusan. dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan. Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;

22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-1/KN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per- 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Sensor Film

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor film. Lembaga sensor film memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas (Pasal 6)

- a) Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
- b) Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Fungsi (Pasal 7)

- a) Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
- b) Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- c) Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- d) Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;

- e) Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- f) Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan. dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di indonesia.

3. Wewenang (Pasal 8)

- a) Penentuan penggolongan usia penonton;
- b) Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film
- c) Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- d) Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e) Pembatalan surat tanda lulus sensor;
- f) Pengusulan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perfilman; dan
- g) Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada presiden melalui menteri secara periodik.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Lembaga Sensor Film, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Berbasis akrual Biro Keuangan terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA. belanja. transfer. surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
- Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO. beban. dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional. LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. dan ekuitas akhir.
- Neraca
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan. daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA. Neraca. LO. dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan. seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen- komitmen lainnya.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Sensor Film.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan. dipakai. atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan. yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ❖ Harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ❖ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ❖ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

9. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025 Lembaga Sensor Film tidak memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan karena Lembaga Sensor Film dengan kode satker 902745 tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

B.1 Pendapatan

B.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Sensor Film untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0. Lembaga Sensor Film dengan kode satker 902745 tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan

URAIAN	31 DESEMBER 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

- Realisasi Pendapatan Lain-lain 30 Juni 2025 sebesar Rp.0 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	0,00%
Jumlah	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	0,00%

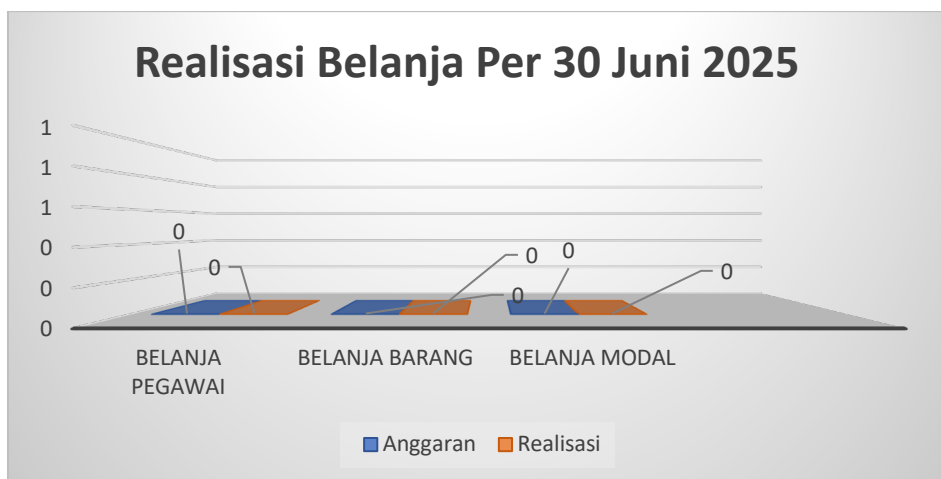
B.2 Belanja

Tidak ada realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2025. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	-	-	0,00%	12.918.219.000	5.201.893.081	40,27%
Belanja Barang	-	-	0,00%	33.869.011.000	9.072.475.797	26,79%
Belanja Modal	-	-	0,00%	2.230.000.000	970.818.200	43,53%
Jumlah	-	-	0,00%	49.017.230.000	15.245.187.078	31,10%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi Belanja per 30 Juni 2025. Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar (100) persen. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.5.201.893.081. Realisasi belanja pegawai 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.201.893.081 atau 100% jika dibandingkan dengan 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

Tabel 4. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	904.687.829	(904.687.829)	-100,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	4.217.269.000	(4.217.269.000)	0,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	79.936.252	(79.936.252)	-100,00%
Belanja Lembur	-	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	0	5.201.893.081	(5.201.893.081)	-100,00%

Tabel 5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 JUNI 2025			30 JUNI 2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	0,00%	2.004.666.000	904.687.829	45,13%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	0,00%	10.334.146.000	4.217.269.000	40,81%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	0,00%	515.714.000	79.936.252	15,50%
Belanja Lembur	-	-	0,00%	63.693.000	-	0,00%

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.9.072.475.797. Realisasi belanja barang 30

Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.9.072.475.797 atau 100% jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Belanja Barang Operasional	-	1.117.515.200	(1.117.515.200)	-100,00%
Belanja Barang Non Operasional	-	1.279.022.808	(1.279.022.808)	-100,00%
Belanja Barang Persediaan	-	3.330.000	(3.330.000)	-100,00%
Belanja Jasa	-	2.213.844.936	(2.213.844.936)	-100,00%
Belanja Pemeliharaan	-	825.880.253	(825.880.253)	-100,00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	3.632.882.600	(3.632.882.600)	-100,00%
Jumlah Belanja	-	9.072.475.797	(9.072.475.797)	-100,00%

Tabel 7. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 JUNI 2025			30 JUNI 2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00%	2.801.907.000	1.117.515.200	39,88%
Belanja Barang Non Operasional	-	-	0,00%	6.327.126.000	1.279.022.808	20,21%
Belanja Barang Persediaan	-	-	0,00%	308.696.000	3.330.000	1,08%
Belanja Jasa	-	-	0,00%	6.070.663.000	1.859.841.700	30,64%
Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00%	1.925.196.000	733.574.000	38,10%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	0,00%	14.539.671.000	3.632.882.600	24,99%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00%	1.895.752.000	-	0,00%
Jumlah Belanja	-	-	0,00%	33.869.011.000	8.626.166.308	25,47%

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp970.818.200 Realisasi belanja modal per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(Rp970.818.200) atau (100%) jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	372.950.000	(372.950.000)	-100%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	597.868.200	(597.868.200)	-100%
Jumlah Belanja	-	970.818.200	(970.818.200)	-100%

Selanjutnya rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja modal per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 JUNI 2025			30 JUNI 2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%	588.000.000	372.950.000	63,43%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%	1.062.000.000	597.868.200	56,30%
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00%	580.000.000	-	0,00%

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.057.020.816. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(372.950.000) atau mencapai (100%) jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

B.2.3.2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp597.868.200. Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024 sebesar Rp597.868.200 atas sebesar 100%. Hal ini disebabkan Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Modal Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar 0 dan Rp0. Lembaga Sensor Film dengan kode satker (902745) tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing – masing sebesar Rp0 dan Rp295.022.375. Realisasi per 30 Juni 2025 mengalami penurunan Rincian Aset Lancar sebesar Rp123.998.041 atau 42.03% jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025. Rincian aset lancar pada satker Lembaga Sensor Film per 30 Juni 2025 tersaji pada table berikut:

Tabel 10. Rincian Aset Lancar
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No	Aset Lancar	REALISASI 31 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK/ (TURUN) Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	0,00%
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	0,00%
3	Persediaan	-	419.020.416	(419.020.416)	-100,00%
4	Persediaan yang Belum Diregiste	-	-	-	0,00%
Jumlah		-	419.020.416	(419.020.416)	-100,00%

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis aset lancar sebagai berikut:

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tidak ada Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 karena seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara.

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kasa merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Tidak ada saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

C.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau

untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp419.020.416 Realisasi persediaan mengalami penurunan sebesar Rp Rp419.020.416 atau 100% jika dibandingkan 30 Juni 2024.

Rincian persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Persediaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Persediaan	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
Barang Konsumsi	-	419.020.416	(419.020.416)	-100%
TOTAL	-	419.020.416	(419.020.416)	-100%

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.705.206.916 dan Rp4.264.686.895. Rincian Aset Tetap Satker Lembaga Sensor Film per 30 Juni 2025 tersaji pada table berikut:

Tabel 12. Rincian Aset Tetap
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
1	Tanah	-	-	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	60.459.071.804	60.174.887.914	284.183.890	0,47%
3	Aset Tetap Renovasi	312.811.175	312.811.175	-	0,00%
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0,00%
5	Aset Tetap lainnya	445.958.099	445.958.099	-	0,00%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	0,00%
	Jumlah	61.217.841.078	60.933.657.188	284.183.890	0,47%
	Akumulasi Penyusutan	(58.085.161.058)	(57.512.634.162)	(572.526.896)	1,00%
	Nilai Buku Aset Tetap	3.132.680.020	3.421.023.026	(288.343.006)	-8,43%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp(58.085.161.058) dan Rp(57.512.634.162). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 60.459.071.804	Rp 57.985.511.058	Rp 2.473.560.746
2	Aset Tetap Lainnya	Rp 758.769.274	Rp 99.650.000	Rp 659.119.274
	Jumlah	Rp 61.217.841.078	Rp 58.085.161.058	Rp 3.132.680.020

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp60.459.071.804.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Peralatan dan Mesin
30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	60.459.071.804
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Hibah Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	60.459.071.804
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp	(57.985.511.058)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	2.473.560.746

Tidak ada mutasi peralatan dan mesin per 30 Juni 2025. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.985.511.058.

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp758.769.274.

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Lainnya
30 Juni 2025

Saldo per 31 Desember 2024	758.769.274
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	758.769.274
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	(99.650.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	659.119.274

Mutasi Aset Tetap Lainnya berupa akumulasi penyusutan sebesar Rp99.650.000.

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Saldo aset lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah Rp1.822.442.723 dan Rp1.822.613.223. Rincian Nilai Aset lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada table berikut:

Tabel 16. Rincian Aset Lainnya
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK/TURUN Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	2.052.276.723	2.052.276.723	-	0,00%
2	Aset Lain-Lain	1.292.337.725	1.292.337.725	-	0,00%
	Jumlah	3.344.614.448	3.344.614.448	-	0,00%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.522.171.725)	(1.522.001.225)	(170.500)	0,01%
	Aset lainnya	1.822.442.723	1.822.613.223	(170.500)	-0,01%

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp2.052.276.723.

Aset Tak Berwujud pada Lembaga Sensor Film berupa Pengembangan aplikasi pemantauan, Pengembangan Website, dan Aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (E-Sias) Tahun 2024 yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Mutasi Aset Tak Berwujud
30 Juni 2025

Saldo per 31 Desember 2024	2.052.276.723
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	2.052.276.723
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(230.175.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1.822.101.723

Tabel 18. Rincian Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud	31 JUNI 2025	31 JUNI 2024	NAIK/TURUN Rp	%
Saldo awal	1.482.639.223	1.482.639.223	-	0,00%
Software			-	0,00%
Aplikasi Pemantauan			-	0,00%
Konten Media Sosial	179.542.500	179.542.500	-	0,00%
Website Lembaga Sensor Film	196.470.000	196.470.000	-	0,00%
Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	193.625.000	193.625.000	-	0,00%
	2.052.276.723	2.052.276.723	-	0,00%

C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp1.292.337.725 dan Rp1.292.337.725. Tidak ada

realisasi aset lain-lain per 30 Juni 2025. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mutasi Aset Lain-Lain
30 Juni 2025

Saldo per 31 Desember 2024	1.292.337.725
Mutasi tambah:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-
Saldo per 30 Juni 2025	1.292.337.725
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	(1.291.996.725)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	341.000

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Uang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp(6.363.640.225) dan Rp (1.310.641.725). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya

Per 30 Juni 2025

No	ASET LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan/Amortisasi Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2025
I	Aset Tak Berwujud			
	Saldo awal	1.482.639.223		1.482.639.223
1	Software		230.175.000	- 230.175.000
2	Aplikasi Pemantauan		-	-
3	Konten Media Sosial	179.542.500	-	179.542.500
4	Website Lembaga Sensor Film	196.470.000	-	196.470.000
5	Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	193.625.000	-	193.625.000
	JUMLAH	2.052.276.723	230.175.000	1.822.101.723
II	Aset Lain-lain			
1	Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.292.337.725	1.291.996.725	341.000
	JUMLAH	1.292.337.725	1.291.996.725	341.000
	TOTAL	3.344.614.448	1.522.171.725	1.822.442.723

C.4 Kewajiban

C.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

C.4.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak ada saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025.

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1 Kegiatan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 30 Juni 2025 Lembaga Sensor Film tidak memiliki Pendapatan. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp572.697.396, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(572.697.396). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(572.697.396). Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024:

Tabel 21. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
Jumlah Pendapatan Operasional	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	(100,00)
Jumlah Beban Operasional	572.697.396	15.943.493.759	(15.370.796.363)	(96,41)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(572.697.396)	(14.716.979.867)	14.144.282.471	(96,11)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	36	(36)	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	36	(36)	(100,00)
POS LUAR BIASA				
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(572.697.396)	(14.716.979.831)	14.144.282.435	(96,11)

D.1.1 Pendapatan

D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.226.513.892. Rincian pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	-100,00%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0,00%
Jumlah	-	1.226.513.892	(1.226.513.892)	-100,00%

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film. Pemungutan tarif sensor tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pelayanan penyensoran tersebut meliputi : Film Nasional. Trailer Nasional. Film Impor. Trailer Impor. Iklan Produk. Televisi. Palwa. Jaringan Informatika. Sarana Promosi. Festival. Kalangan Terbatas. Event. Peninjauan.

Pendapatan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.226.513.892 (100) persen dari tahun 2024.

D.1.2 Beban

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Lembaga Sensor Film pada TA 2025 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Beban pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.044.187.559. Realisasi beban gaji per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari beban gaji tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak memiliki Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).

Tabel 23. Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	1.010.790.194	(1.010.790.194)	-100,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	4.940.718.000	(4.940.718.000)	-100,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	92.679.365	(92.679.365)	-100,00%
Jumlah Belanja	0	6.044.187.559	(6.044.187.559)	-100,00%

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp23.097.955. Realisasi beban persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.097.955 atau (100) persen dari beban persediaan tahun anggaran 2024.

Tabel 24. Rincian Beban Persediaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	23.097.955	(23.097.955)	-100,00%
Jumlah Beban Persediaan	0	23.097.955	(23.097.955)	-100,00%

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.773.187.944. Realisasi beban barang dan jasa per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.773.187.944 atau 100 persen dari tahun anggaran 2024.

Rincian beban jasa untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	-	1.190.203.200	(1.190.203.200)	-100,00%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	61.812.000	(61.812.000)	-100,00%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00%
Beban Bahan	-	160.351.600	(160.351.600)	-100,00%
Beban Honor Output Kegiatan	-	87.710.000	(87.710.000)	-100,00%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	1.030.961.208	(1.030.961.208)	-100,00%
Beban Sewa	-	1.890.148.100	(1.890.148.100)	-100,00%
Beban Jasa Profesi	-	293.785.000	(293.785.000)	-100,00%
Beban Jasa Lainnya	-	58.216.836	(58.216.836)	-100,00%
Jumlah	0	4.773.187.944	(4.773.187.944)	-100,00%

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp825.880.253. Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp825.880.253 atau 100 persen dibandingkan tahun 2024.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	189.862.900	(189.862.900)	-100,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	321.339.888	(321.339.888)	-100,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	314.677.465	(314.677.465)	-100,00%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-		-	0,00%
Jumlah	-	825.880.253	(825.880.253)	-100,00%

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.632.882.600. Realisasi beban perjalanan dinas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.632.882.600 atau 100 persen dari beban perjalanan dinas tahun anggaran 2024.

Rincian beban perjalanan dinas untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	-	1.774.819.200	(1.774.819.200)	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	8.330.000	(8.330.000)	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	800.965.000	(800.965.000)	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	1.048.768.400	(1.048.768.400)	-100,00%
Jumlah	-	3.632.882.600	(3.632.882.600)	-100,00%

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp572.697.396 dan Rp644.257.448. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	547.614.396	619.174.448	(71.560.052)	-11,56%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	24.912.500	24.912.500	-	100,00%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Berwujud	170.500	170.500	-	100,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	572.697.396	644.257.448	(71.560.052)	-11,11%

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp36. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36 dibandingkan tahun 2024.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) Rp	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	36	(36)	-100%
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	36	(36)	0%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	36	(36)	-100%

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp5.785.481.635 mengalami kenaikan Ekuitas sehingga jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp5.946.840.555.

Tabel 30. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

NO	URAIAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
1	Ekuitas Awal	5.946.840.555	5.785.481.635	161.358.920	0,00%
2	Surplus/Defisit - LO	(572.697.396)	(14.716.979.831)	14.144.282.435	-96,11%
3	Transaksi Antar Entitas	-	14.018.673.150	(14.018.673.150)	-100,00%
	EKUITAS AKHIR	5.374.143.159	5.087.174.954	286.968.205	5,64%

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 01 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.946.840.555 dan Rp5.785.481.635

E.2 Surplus / Defisit LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(572.697.396) dan Rp(14.716.979.831).

Tabel 31. Rincian Surplus (Defisit) LO
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/TURUN Rp	%
Surplus/Defisit dari kegiatan operasional	(572.697.396)	(14.716.979.867)	14.144.282.471	-96,11%
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	-	36	(36)	0,00%
Pos luar biasa	-	-	-	0,00%
Jumlah	(572.697.396)	(14.716.979.831)	14.144.282.435	-96,11%

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp14.018.673.150. rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 32. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
Per 30 Juni 2025

No	Jenis Transaksi Antar Entitas	Jumlah
1	Ditagihkan dari entitas lain	-
2	Diterima dari entitas lain	-
3	Transfer Masuk	-
Jumlah		-

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Penurunan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(572.697.396) dan Rp(698.306.681).

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.374.143.159 dan Rp5.087.174.954.

AKUN NERAKA KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2025						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				Nilai Buku
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI		
1	2	4	5	6	7	8	6	7=6-6
132111	Peralatan dan Mesin	1.353,	60.459.071.804,	(57.437.896.662)	(547.614.396)	0,	(57.985.511.058),	2.473.560.746,
30103	ALAT BANTU	2,	38.880.000,	(31.902.858),	(634.286),	0,	(32.537.144),	6.342.856,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	20,	2.218.157.800,	(1.908.514.948),	(1.928.572),	0,	(1.970.443.520),	247.714.252,
30401	ALAT PENGOLAHAN	7,	44.207.000,	(29.846.376),	(2.872.124),	0,	(32.718.500),	11.488.500,
30501	ALAT KANTOR	106,	2.399.853.696,	(2.331.765.696),	(18.570.000),	0,	(2.350.335.696),	49.518.000,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	488,	6.035.011.341,	(5.720.466.397),	(57.593.144),	0,	(5.778.059.541),	256.951.800,
30601	ALAT STUDIO	97,	33.618.073.940,	(32.156.970.240),	(209.467.388),	0,	(32.366.437.628),	1.251.636.312,
30602	ALAT KOMUNIKASI	18,	5.551.372.500,	(5.520.747.500),	(6.875.000),	0,	(5.527.622.500),	23.750.000,
30701	ALAT KEDOKTERAN	53,	134.227.050,	(88.612.050),	(6.880.000),	0,	(95.492.050),	38.735.000,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	29,	177.750.000,	(153.375.000),	(4.875.000),	0,	(158.250.000),	19.500.000,
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7,	70.555.000,	(69.077.858),	(1.477.142),	0,	(70.555.000),	0,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10,	11.000.000,	(11.000.000),	0,	0,	(11.000.000),	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5,	121.255.250,	(97.586.500),	(8.168.750),	0,	(105.755.250),	15.500.000,
31001	KOMPUTER UNIT	233,	3.794.384.883,	(3.491.210.641),	(88.312.242),	0,	(3.579.522.883),	214.862.000,
31002	PERALATAN KOMPUTER	263,	6.154.378.344,	(5.791.915.844),	(75.462.500),	0,	(5.867.374.344),	287.000.000,
31504	ALAT KERJA PENGERANGAN	15,	89.965.000,	(34.904.754),	(4.498.248),	0,	(39.403.002),	50.561.998,
135111	Aset Tetap Renovasi	15,	312.811.175,	0,	0,	0,	0,	312.811.175,
60705	ASET TETAP LAHAP DA DALAM RENOVASI	15,	312.811.175,	0,	0,	0,	0,	312.811.175,
135121	Aset Tetap Lainnya	559,	445.958.099,	(74.737.500),	(24.912.500),	0,	(99.650.000),	346.308.099,
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	557,	48.933.099,	0,	0,	0,	0,	48.933.099,
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1,	197.725.000,	0,	0,	0,	0,	197.725.000,
60201	BARANG BERCOROK KESENIAN	1,	199.300.000,	(74.737.500),	(24.912.500),	0,	(99.650.000),	99.650.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	126,	1.292.337.725,	(1.291.826.225),	(170.500),	0,	(1.291.996.725),	341.000,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,	32.000.000,	(32.000.000),	0,	0,	(32.000.000),	0,
30501	ALAT KANTOR	22,	235.367.000,	(235.367.000),	0,	0,	(235.367.000),	0,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	99,	859.888.725,	(859.377.725),	(170.500),	0,	(859.547.725),	341.000,
30601	ALAT STUDIO	4,	165.082.000,	(165.082.000),	0,	0,	(165.082.000),	0,
JUMLAH		2.053,	62.516.178.803,	(58.804.460.387),	(572.697.396),	0,	(59.377.157.783),	3.133.021.020,